

OMBUDSMAN SARANKAN BANGKA BELITUNG INTENSIFKAN PASAR MURAH UNTUK TEKAN HARGA SEMBAKO

Kamis, 19 Maret 2026 - kepbabel

PANGKALPINANG – Ombudsman Perwakilan Kepulauan Bangka Belitung menyarankan pemerintah daerah di Kepulauan Babel mengintensifkan pasar murah guna menekan kenaikan harga kebutuhan pokok masyarakat menjelang Hari Raya Idul Fitri 2026.

"Saat ini, harga sudah mulai bergerak naik secara signifikan, bahkan di beberapa pasar telah masuk kategori merah," kata Plt Kepala Perwakilan Ombudsman Babel Kgs Chris Fither di Pangkalpinang, Babel, Rabu(18/3).

Ombudsman Sarankan Bangka Belitung Intensifkan Pasar Murah untuk Tekan Harga Sembako

Ia mengatakan hasil pengawasan Ombudsman Babel menunjukkan harga berbagai kebutuhan pokok di sejumlah pasar tradisional di Kota Pangkalpinang, Kabupaten Bangka, Bangka Tengah, Bangka Selatan, Belitung, Belitung Timur, mengalami kenaikan cukup tinggi, karena permintaan masyarakat, yang meningkat menjelang Lebaran 2026.

Misalnya, di Pasar Lipat Kajang, Manggar, Kabupaten Belitung Timur, sebagai wilayah dengan tekanan harga paling tinggi, yakni lebih dari 40 persen komoditas berada pada kategori merah dan 35 persen kategori kuning.

Harga cabai rawit merah di pasar tersebut mencapai Rp120.000 per kilogram atau lebih dari 100 persen di atas harga acuan penjualan (HAP), serta naik 41 persen dibandingkan awal Maret 2026, yang berada di kisaran Rp85.000 per kg.

Kenaikan juga terjadi pada komoditas lain, seperti daging sapi yang mencapai Rp170.000 per kilogram, beras premium Rp18.000 per kilogram, dan telur ayam ras sekitar Rp2.200 per butir.

"Pasar Lipat Kajang saat ini dapat dikategorikan sebagai zona merah. Kenaikan terjadi pada banyak komoditas sekaligus yang menunjukkan perlunya intervensi yang lebih masif dan terfokus," katanya.

Selain itu, Ombudsman Babel juga menemukan adanya ketidaksesuaian antara data Laporan Harian SP2KP Kementerian Perdagangan dengan kondisi riil di lapangan.

Pada beberapa komoditas utama, terdapat selisih harga hingga 10 hingga 20 persen yang berpotensi menyebabkan kebijakan pengendalian harga menjadi kurang tepat sasaran.

"Kalau data yang digunakan tidak akurat, maka kebijakan juga tidak akan efektif. Kami mendorong agar stakeholder terkait memastikan enumerator maupun kontributor benar-benar mencatat harga riil di lapangan, bukan sekadar angka administratif," ujarnya.

Ia menambahkan berdasarkan tren pergerakan harga dan wawancara dengan pedagang serta masyarakat, Ombudsman

Babel memprediksi bahwa puncak kenaikan akan terjadi pada H-2 hingga H-1 Idul Fitri.

"Intervensi tidak bisa menunggu puncak. Harus dilakukan sekarang, terutama di wilayah yang sudah masuk kategori merah. Operasi pasar murah harus diperluas dan diperbanyak," ujarnya.